

# LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ALTERNATIF STRATEGIS MEMAJUKAN SEKTOR AGRIBISNIS

## SITUASI DAN KONDISI SEKTOR AGRIBISNIS NASIONAL

Agribisnis memiliki peran penting dalam proses pembangunan perekonomian di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi menghancurkan berbagai sektor usaha,



agribisnis teruji merupakan sektor yang mampu bertahan dan tetap memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan nasional. Agribisnis merupakan katup penyelamat ketika perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan (Arifin, 2000). Ditinjau dari keunggulan komparatif, produk agribisnis memegang peran penting dalam perdagangan bebas dunia. Mengingat produk agribisnis memiliki kandungan lokal (*local content*) yang besar dibandingkan dengan komoditi manufaktur (Saragih, 2000). Ditinjau dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB), peran sektor pertanian terhadap pendapatan nasional sangat besar. Nilai PDB sektor pertanian atas dasar harga konstan 1993 pada tahun 2000 tercatat sebesar 68.018 milyar rupiah atau sebesar 15,9% dari PDB Nasional dengan laju pertumbuhan sebesar 2,3 % (Bank Indonesia, 2003). Ditinjau dari aspek pengolahan produk agribisnis, agroindustri memiliki peran penting dalam perindustrian nasional. Pangsa nilai tambahnya dalam industri non-migas sebesar 80,7 %, kesempatan kerja 74,9%, dan efek pengganda nilai tambah sebesar 3,2 (Saragih, 2000).

**PERKEMBANGAN AGRIBISNIS  
DI INDONESIA BELUM  
MENUNJUKKAN KINERJA YANG  
MENGEMBIRAKAN.  
PRODUKTIVITAS BERBAGAI  
KOMODITAS UTAMA PRIMER  
PERTANIAN MASIH DIBAWAH RATA-  
RATA PRODUKTIVITAS NEGARA  
PRODUSEN LAIN. RASIO INPUT  
OUTPUT PADA SISTEM  
PENGOLAHAN MASIH RENDAH.  
KEGIATAN PEMBERIAN NILAI  
TAMBAH PADA PRODUK BELUM  
OPTIMAL. SECARA KESELURUHAN,  
PRODUK YANG DIHASILKAN (BAIK  
PRIMER MAUPUN OLAHAN) MASIH  
BELUM MAMPU MENEMBUS PASAR  
DUNIA YANG PADA SAAT INI  
SANGAT KETAT MENERAPKAN  
BERBAGAI PERSYARATAN TINGKAT  
KEAMANAN PRODUK DAN PROSES.**

Walaupun demikian, perkembangan agribisnis di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Produktivitas berbagai komoditas utama primer pertanian masih dibawah rata-rata produktivitas negara produsen lain. Rasio input output pada sistem pengolahan masih rendah. Kegiatan pemberian nilai tambah pada produk belum optimal. Secara keseluruhan, produk yang dihasilkan (baik primer maupun olahan) masih belum mampu menembus pasar dunia yang pada saat ini sangat ketat menerapkan berbagai persyaratan tingkat keamanan produk dan proses.

Kinerja sektor agribisnis yang belum optimal disebabkan oleh berbagai permasalahan internal dan eksternal yang terdapat dalam sistem agribisnis. Permasalahan internal tidak terlepas dari kondisi pelaku, sifat kegiatan, dan sifat produk yang dihasilkan. Secara kuantitas jumlah pelaku di sektor agribisnis sangat besar, namun ditinjau dari

an produk dan proses.

<sup>\*)</sup> Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

<sup>\*\*)</sup> Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan S3 Ekonomi Pertanian Pasca Sarjana IPB serta Staf Pengajar FEM-IPB

sisi kualitas sangat memprihatinkan. Petani di Indonesia rata-rata dicirikan oleh: (1) rendahnya kepemilikan dan penguasaan faktor produksi, (2) kurang mampu memanfaatkan dan memperluas peluang dan akses pasar, (3) memiliki kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan akses terhadap sumber-sumber permodalan, (4) keterbatasan dalam penguasaan teknologi, (5) memiliki kelemahan di bidang organisasi dan manajemen. Di samping itu petani di Indonesia rata-rata memiliki pendidikan formal yang rendah namun sangat berpengalaman. Sebagian asset yang dimilikinya merupakan asset non produktif yang hanya dapat digunakan bagi penyelenggaraan kegiatan rumahtangga. Rata-rata kepemilikan luas lahan petani adalah dibawah 1 hektar (Puslitbang Perkebunan, 2003). Ditinjau dari sisi pendapatan dan pengeluaran, sebagian pendapatan yang diperoleh digunakan untuk membiayai kegiatan konsumsi. Alokasi bagi investasi dan tabungan hanya sebesar 20% dari pendapatan, sehingga pendanaan secara internal kegiatan produktif sangat kecil. Pada sisi yang lain, akses petani terhadap lembaga keuangan sangat terbatas (Puslitbang Perkebunan, 2002). Ditinjau dari sifat kegiatannya terlihat bahwa sebagian besar petani di Indonesia hanya melakukan kegiatan budidaya (*on farm*) yang dicirikan oleh ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap faktor alam. Adapun produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk primer yang memiliki karakteristik mudah rusak (*perishable*), beragam kualitas dan kuantitas (*variability*), dan *bulky*. Selain itu sistem produksi yang bersifat musiman telah menciptakan fluktuasi harga yang cukup tinggi pada pasar komoditi primer (Kohls, 1990 dan BAPPEBTI. 2002).

Salah satu **permasalahan eksternal** dalam sistem agribisnis yaitu rendahnya dukungan lembaga keuangan terhadap keberlangsungan kegiatan sejak dari hulu hingga hilir. Situasi yang terjadi, peran perbankan dalam penyelenggaraan kegiatan agribisnis di Indonesia masih sangat terbatas (Nuswantoro, 2002). Hal ini terlihat dari: (1) tidak beroperasinya Bank Pertanian di Indonesia,

sedangkan di negara Malaysia, Korea, dan Taiwan, perkembangannya sangat baik. (2) pendanaan kegiatan agribisnis di Indonesia masih memberlakukan tingkat bunga yang sangat tinggi yang hampir sama dengan tingkat bunga komersial, yaitu 12-14% untuk pertanian 18% untuk kegiatan komersial. Tingkat bunga pertanian di Malaysia dan Taiwan 3 kali lebih rendah daripada tingkat bunga komersial. (3) secara operasional, pemberian kredit pertanian di Indonesia masih menggunakan pola *top down*, dimana pagu kredit ditetapkan seragam oleh pemerintah. Berbeda dengan Malaysia, Korea, dan Taiwan, pola yang digunakan adalah *bottom up*, dimana petani dimana pagu kredit diberikan berdasarkan proposal yang diajukan oleh petani. (4) cakupan pemberian dana oleh perbankan bagi sektor agribisnis masih terbatas pada kegiatan *on farm*. Di Malaysia, Korea, dan Taiwan, pendanaan dilakukan bagi seluruh subsistem dalam sistem agribisnis.

## PERAN LEMBAGA KEUANGAN BAGI SEKTOR AGRIBISNIS

Situasi dan kondisi sektor agribisnis nasional menunjukkan bahwa: (1) profil petani yang sangat marjinal, (2) sifat kegiatan yang mengandung ketidakpastian yang sangat besar sehingga memiliki resiko yang sangat tinggi, serta (3) sifat produk dengan keragaman tinggi, daya tahan rendah, serta memiliki harga yang sangat fluktuatif. Pada sisi yang lain peran perbankan bagi sektor ini masih sangat terbatas. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah belum adanya kesesuaian prinsip antara bentuk pendanaan dan sifat kegiatan yang didanai. Dalam sistem perbankan konvensional aturan main yang berlaku yaitu: (1) bunga ditentukan di muka dengan asumsi bahwa kegiatan yang didanai harus untung, (2) persentase keuntungan ditetapkan berdasarkan modal yang dipinjamkan, (3) pembayaran bunga berlaku tetap tanpa mempertimbangkan alasan apapun dan (4) walaupun keuntungan meningkat, jumlah pembayaran bunga tidak mengalami peningkatan (Antonio, 2000).

Penggunaan sistem bunga yang ditetapkan pada awal perjanjian menjadikan sistem ini sangat menghindari pendanaan kegiatan dengan resiko yang sangat tinggi sehingga pendanaan kegiatan agribisnis bukan menjadi sasaran utama optimalisasi perolehan keuntungan. Jika bank mendanai kegiatan agribisnis, maka diberlakukan tingkat suku bunga yang sama dengan kegiatan komersial lainnya. Penerapan sistem pendanaan yang mengabaikan karakteristik dari kegiatan yang didanai ini pada akhirnya menjadikan manfaat yang diperoleh bank dari sektor agribisnis tidak optimal sehingga dalam jangka panjang sebagai upaya minimisasi resiko, pendanaan bagi sektor ini semakin kecil jumlahnya.

### STRATEGI PENINGKATAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Mencermati peranan sektor agribisnis yang sangat strategis dan kondisi mikro yang spesifik, sektor ini memerlukan lembaga penunjang yang spesifik pula. Pemulihan perekonomian nasional dapat dilakukan dengan baik bila menetapkan sektor agribisnis sebagai sektor pemacu (*the leading sector*) dengan disertai perbaikan operasionalisasi lembaga keuangan sebagai salah satu lembaga penunjang yang sangat penting. Mengingat kegiatan agribisnis sangat dipengaruhi faktor alam yang merupakan faktor yang berada di luar kendali manusia dan output yang dihasilkan memiliki karakteristik khusus yaitu mudah rusak (*perishable*), beragam kualitas dan kuantitas (*variability*), *bulky* dengan harga yang sangat berfluktuasi, maka lembaga keuangan yang dibutuhkan yaitu lembaga yang memiliki 3 prinsip utama yaitu: (1) menetapkan sistem bagi resiko dan bagi hasil secara adil, yaitu dengan memperhitungkan kemungkinan untung dan rugi. (2) menghindari penetapan besaran keuntungan di awal perjanjian (3) menetapkan bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh.

Lembaga keuangan yang mampu menjawab tantangan ini adalah Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga ini pada dasarnya menerapkan konsep berdasarkan perjanjian bagi hasil, yaitu kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko proyek yang dijalankan, jika untung mereka sama-sama memperoleh keuntungan dengan cara pembagian yang disetujui dan jika rugi sama-sama menanggung kerugian. Dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah dicirikan oleh: (1) investasi yang halal, (2) tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, jual beli atau sewa,

(3) berorientasi kepada keuntungan dan kesejahteraan, (4) menerapkan hubungan kemitraan, dan (5) seluruh kegiatan berada di bawah pengawasan Dewan Syariah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut hemat penulis ada beberapa strategi yang harus ditempuh oleh lembaga keuangan syariah dalam rangka meningkatkan perannya bagi sektor agribisnis terbagi menjadi: strategi tingkat industri, strategi tingkat korporasi, dan strategi operasional. Pada saat ini, lembaga keuangan syariah berhadapan dengan permasalahan eksternal yang berkaitan dengan pemahaman terhadap ajaran Islam secara keseluruhan dan pandangan terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu strategi **tingkat industri** meliputi: (1) meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap ajarannya, sehingga pemahaman terhadap ajaran Islam tidak lagi bersifat parsial dan pola pikir digunakan tidak lagi materialistik dan sekularistik. (2) memanfaatkan momentum fatwa majelis ulama tentang bunga bank itu riba dengan memperbaiki pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga dipahami bahwa bunga bukan riba dan lembaga keuangan syariah adalah lembaga ekonomi dan tidak semata berorientasi sosial.

Pertanyaan selanjutnya adalah “bagaimana lembaga keuangan syariah yang konsepnya sejalan dengan kebutuhan sektor agribisnis mampu berperan secara riil?”. Pada **tingkat korporasi**, strategi yang dapat ditempuh untuk memperbesar peranan lembaga keuangan syariah dalam memajukan sektor agribisnis di masa yang akan datang yaitu jika selain memegang 3 prinsip utama di atas, lembaga keuangan syariah juga membangun kekuatan kelembagaannya dengan cara: (1) memasukkan sektor agribisnis dalam portfolio kredit secara signifikan, yaitu dengan memperbesar porsi pendanaan bagi sektor agribisnis, (2) menyediakan berbagai alternatif pola pendanaan yang berdasarkan: (a) subsektor kegiatan: tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, dan (b) tahapan kegiatan: dari hulu hingga hilir. Dengan demikian seluruh subsektor memiliki daya tarik yang kompetitif dan secara keseluruhan sistem agribisnis dari hulu ke hilir dapat berkembang secara optimal, (3) memberlakukan sistem pendanaan yang memperhatikan jadwal dan tahapan kegiatan agribisnis (Tabel 1), sehingga berbagai kendala yang dihadapi pada setiap tahapannya dapat teratasi dan berbagai resiko yang menyertai setiap kegiatan dapat tebagi secara proposional.

Tabel 1. Alternatif Pendanaan sebagai Pemecahan Masalah dalam Sistem Agribisnis

Kegiatan Agribisnis	Kendala	Jenis pendanaan
Pembukaan Lahan	Biaya besar	Murabaha
Pengadaan Input	Modal di awal	Bai Muajjal
Pengadaan Alat dan Mesin	Biaya Besar Modal di awal	Ijara
Budidaya	Resiko Besar	Istisna
Panen	Kepastian jumlah dan mutu	Bai Salam
Pembukaan pabrik pengolahan	Biaya Besar	Ijara atau Ijara wa Iqtina
Pengadaan alat pengolahan	Biaya Besar	Ijara atau Ijara wa Iqtina
Pengolahan	Biaya besar	Mudharaba
Pemasaran	Kepastian Harga	Bai Salam
Transfer teknologi	Biaya Besar	Musharaka
Pengembangan sumberdaya manusia	Biaya Besar	Musharaka
Pengadaan biaya hidup	Kontinuitas	Qard Hasan
Perlindungan aset	Resiko Besar	Takaful

Secara operasional, lembaga keuangan syariah harus memperkuat aspek kelembagaannya sehingga dapat mewujudkan misi dan tujuan dalam cakupan industri maupun korporasi. Aspek kelembagaan secara internal dapat dibangun dengan cara: (1) memperkuat struktur kelembagaan, (2) mengembangkan perilaku kelompok dan individu, dan (3) meningkatkan efisiensi proses. Strategi **memperkuat struktur kelembagaan**, bertujuan untuk memperkuat lembaga. Cara yang dapat ditempuh meliputi:

1. Aspek sumberdaya manusia.
  - a. Menggunakan tenaga-tenaga yang berjiwa islami, cerdas, adaptif, terampil, dan berwawasan global
  - b. menerapkan sistem pengembangan sumberdaya manusia yang *up to date*
2. Aspek pemasaran
  - a. Membangun jaringan pemasaran yang luas
  - b. Menyiapkan tenaga pemasaran yang handal

- c. Memberikan pelayanan yang optimal
3. Aspek pengembangan bisnis
  - a. Mendorong lahirnya inovasi produk dan jasa
  - b. Menciptakan produk dan jasa yang kompetitif
  - c. Menciptakan berbagai nilai tambah dari produk dan jasa yang ditawarkan
  - d. Menciptakan berbagai terobosan teknis
4. Aspek pendanaan dan keuangan
  - a. Menciptakan sistem yang efisien
  - b. Membangun keuangan perusahaan yang sehat
5. Aspek teknologi
  - a. Membangun teknologi berbasis "*consumer need*"
  - b. Mempercepat operasionalisasi industri penunjang

Sedangkan strategi **mengembangkan perilaku kelompok dan individu**, bertujuan untuk menciptakan karakter perusahaan yang

dicerminkan oleh perilaku kelompok dan individu dalam perusahaan. Cara yang dapat ditempuh meliputi pengembangan budaya perusahaan dan pensosialisasian norma-norma yang dianut perusahaan secara kontinu

Adapun strategi **meningkatkan efisiensi proses**, bertujuan untuk menciptakan proses yang berlangsung secara efisien dalam upaya pencapaian tujuan. Cara yang ditempuh yaitu dengan (1) membuka diri terhadap perkembangan global, (2) menerapkan konsep *benchmarking* secara internal atau eksternal, baik dari aspek strategis maupun fungsional, dan (3) membangun system yang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan konsumen.

Dengan menerapkan konsep utama dan ketiga strategi pengembangan inilah maka peran lembaga keuangan syariah akan semakin besar. Pada akhirnya kesesuaian antara kebutuhan sektor agribisnis dan tawaran pelayanan dari lembaga keuangan syariah inilah yang akan menciptakan sinergi besar dalam pergerakan sektor riil. Optimalisasi peran sebagai lembaga penunjang pembangunan nasional pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan sistem agribisnis sebagai sebuah mega bisnis masa depan yang tangguh dan berdaya saing.

#### Appendix: Konsep Investasi Syariah

<b>Bai Salam</b>	Kontrak perdagangan dimana pembeli melakukan pembayaran dimuka atas barang yang dipesannya dan barang tersebut baru akan diterima pada masa yang akan datang.
<b>Bai Muajjal</b>	Adalah kontrak yang menyangkut transaksi barang yang basis pembayarannya berbeda. Bank atau pihak yang penyedia dana secara langsung membeli barang yang diperlukan oleh pihak yang membutuhkan dana untuk dan atas nama pihak tersebut. Selanjutnya Bank akan menjual barang tersebut kepada pihak yang membutuhkannya dan atas persetujuan klien tersebut maka bank akan membebaskan biaya-biaya tertentu.
<b>Ijara (Leasing)</b>	Kontrak atau perjanjian dimana bank atau pihak yang mendanai pembelian dan kembali menyewakan barang-barang tersebut kepada pihak yang memerlukan dengan menetapkan biaya atas penyewaan barang atau peralatan tersebut. Jangka waktu penyewaan barang ditetapkan dimuka, sedangkan status kepemilikan masih dipegang oleh pihak bank.
<b>Ijara wa Iqtina (Lease to Purchase)</b>	Seperti halnya Ijara, <i>Ijara wa Iqtina</i> perbedaannya terletak pada komitmen yang disampaikan oleh konsumen yang menyewa barang tersebut yang berjanji akan membeli barang yang disewanya diakhir perjanjian. Pembayaran untuk membeli barang tersebut dikalkulasikan dalam komponen harga sewa.
<b>Istisna (Progressive Financing)</b>	Kontrak yang dibuat antara pihak-pihak yang menentukan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan <i>progress</i> pekerjaan atau telah dipenuhinya spesifikasi pekerjaan.

<b>Murabaha (<i>Cost-Plus Financing</i>)</b>	Kontrak dagang antara bank dan nasabah bank yang sepakat menentukan bahwa kelebihan atas harga yang didapat akan diberikan kepada bank.
<b>Mudaraba (<i>Trust Financing</i>)</b>	Kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak, dimana pihak pertama merupakan pihak yang sepenuhnya sebagai penyandang dana dari modal usaha, sedangkan pihak yang menjadi pengelola dana (mudarib) akan menggunakan segala keahlian dan kemampuannya dalam pengelolaan dana. Keuntungan yang didapat akan di bagi rata.
<b>Musharaka (<i>Partnership Financing</i>)</b>	Konsep ini merupakan konsep perjanjian klasik didalam sistem keuangan Islam dimana pihak-pihak sepakat untuk secara bersama-sama melakukan kontribusi pembiayaan. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan persetujuan yang dibuat sebelumnya sedangkan kerugian akan dibagi rata sesuai dengan kepemilikan modal usaha. Manajemen usaha dapat dibagi rata secara bersama-sama atau menunjuk salah seorang diantaranya.
<b>Qard Hassan</b>	Konsep pinjaman tanpa bunga yang mana tujuan dari pihak yang meminjam adalah berkaitan dengan kegiatan sosial atau pinjaman jangka pendek. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja.
<b>Takaful</b>	Konsep dari sistem asuransi Islam yang bersumber dari pada pengejawantahan prinsip Taawun atau kerjasama. Prinsip ini diimplemntasikan dalam bentuk perlindungan bersama-sama atas kekayaan serta harta dan juga menawarkan kerjasama dalam membagi resiko usaha diantara anggotanya.

## REFERENSI

- Antonio S.M. 2000. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Bank Indonesia. Jakarta.
- Arifin, B. 2003. Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2003. Data Indikator Makro dan Perbankan Nasional. <http://www.bi.go.id>.
- BAPPEBTI. 2002. Fungsi Ekonomi Perdagangan Berjangka Komoditi. Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka
- Kohls, R L and J. N. Uhl. 1990. Marketing of Agricultural Products. 7<sup>th</sup> ed. Macmillan Pub. Comp.
- Nuswantoro, B. 2002. Prospek Bank Pertanian di Indonesia. Paper Falsafah Sains. Program Pascasarjana IPB.
- Puslitbang Perkebunan. 2002. Laporan Penelitian "Sumber Pendanaan Perkebunan Rakyat".
- Puslitbang Perkebunan dan Bank Dunia. 2003. *Report of Studies on Smallholder Tree Crops Production and Poverty Alleviation*.
- Saragih, B. 2000. Kebijakan Pertanian untuk Merealisasikan Agribisnis sebagai Penggerak Utama Perekonomian Negara. *Paper on Panel Discussion. Center Policy for Agro Studies*.